



Southeast Asia Aid Map (Peta Bantuan Asia Tenggara) adalah basis data komprehensif yang melacak alur pendanaan pembangunan resmi (ODF) di seluruh Asia Tenggara. Proyek yang diluncurkan oleh Lowy Institute pada tahun 2023 dan diperbarui setiap tahun ini didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Dengan mempromosikan transparansi alur ODF yang lebih luas, Lowy Institute berupaya menambah koordinasi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat pengambilan keputusan dan pembahasan kebijakan tentang bantuan, pembangunan, dan persaingan geoekonomi di wilayah Asia Tenggara.

Southeast Asia Aid Map edisi ketiga ini mencakup periode tahun 2015-2023. Peta ini mencakup data tentang lebih dari 130.000 proyek yang dilakukan oleh 109 mitra pembangunan, dengan nilai total \$290 miliar.

Penelitian ini mencakup 11 negara Asia Tenggara: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam. Petanya menyusun jutaan titik data dari basis data dan mekanisme pelaporan resmi. Data tersebut digabungkan dengan informasi dari ribuan dokumen yang tersedia untuk umum, termasuk laporan tahunan, laporan keuangan, dokumen anggaran, pelaporan media berita, dan sumber media sosial. Basis data yang dihasilkan adalah laporan paling komprehensif yang dikumpulkan dari proyek-proyek pembangunan di Asia Tenggara.

2025 Key Findings Report (Laporan Temuan Utama 2025) ini mencakup analisis lanskap pendanaan pembangunan Asia Tenggara yang terus berkembang dan profil untuk masing-masing dari 11 negara Asia Tenggara yang tercakup dalam basis data.

## Temuan utama tahun 2025

- Dukungan pembangunan regional sedikit meningkat pada tahun 2023, tetapi tetap di bawah tingkat sebelum COVID.
- Pemotongan bantuan dari AS, Uni Eropa, dan Inggris dapat menyebabkan pendanaan pembangunan resmi di wilayah Asia Tenggara menurun lebih dari \$2 miliar pada tahun-tahun mendatang.
- Pemotongan bantuan dari negara Barat dan meningkatnya ketegangan perdagangan akan mengurangi pilihan pembangunan Asia Tenggara dan membuka peluang bagi Tiongkok untuk mengambil alih pengaruh.
- Pemotongan bantuan juga akan memperparah kesenjangan pembangunan, sehingga mengakibatkan negara-negara miskin dan prioritas sektor sosial tertinggal.
- Laju pembangunan infrastruktur Asia Tenggara makin melambat.
- Kurangnya pendanaan yang signifikan untuk transisi energi di wilayah Asia Tenggara dapat memicu konsekuensi global.
- Kemajuan dalam penanganan isu iklim dan inklusi sosial berpotensi menghadapi tekanan.

Untuk mengetahui info selengkapnya dan menggunakan fitur interaktif dari Southeast Asia Aid Map, kunjungi [seamap.lowyinstitute.org](https://seamap.lowyinstitute.org)

## INDONESIA

<b>\$100 miliar</b>	PENGELUARAN
<b>\$119 miliar</b>	PENGALOKASIAN
<b>20,456</b>	PROYEK
<b>85</b>	MITRA PEMBANGUNAN

Indonesia adalah negara dengan pendapatan ekonomi menengah ke atas menurut Bank Dunia, setelah berhasil naik status dari negara berpendapatan menengah ke bawah pada Juli 2023.

Pada tahun 2023, Indonesia menerima dana pembangunan resmi sebesar \$10 miliar. Tiongkok, Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB) telah menjadi mitra pembangunan utama Indonesia, dengan total sumbangan hampir 60% dari ODF Indonesia sejak 2015. Tingkat pengeluaran Tiongkok yang lebih rendah di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 telah mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023, yang didorong oleh selesainya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Meskipun ada pembelanjaan dana secara besar-besaran, volume pengeluaran pada tahun 2023 hanya setengah dari pengeluaran tahunan rata-rata Tiongkok pada periode 2015-2022.

Sejak tahun 2021, Bank Dunia telah menjadi mitra pembangunan terbesar Indonesia, dengan kontribusi rata-rata 27% dari total ODF Indonesia selama tiga tahun terakhir. Sektor energi, pemerintahan, dan masyarakat sipil menerima ODF terbanyak di Indonesia, masing-masing mencapai 21% dari total. Dibandingkan dengan total ODF, pengeluaran di sektor transportasi dan penyimpanan mencapai sekitar setengah dari rata-rata regional. Selama tahun 2015-2023, Indonesia menerima lebih dari rata-rata regional untuk ODF yang mengintegrasikan inklusi disabilitas (12%). Namun, penerimaan untuk ODF yang menargetkan kesetaraan gender (22%) dan aksi iklim (26%) sedikit di bawah rata-rata regional.

Indonesia adalah pemberi ODF intraregional terbesar keenam, yang memberikan jumlah rata-rata tahunan sebesar \$235.000 selama 2015-2023. Bantuan intraregional Indonesia biasanya diberikan pada sektor bantuan kemanusiaan, dengan kontribusi sesekali untuk pemerintah dan masyarakat sipil, pendidikan, dan kesehatan. Jakarta telah menyalurkan sekitar setengah dari ODF-nya ke Myanmar sebagai bantuan kemanusiaan, dan juga telah memberikan sejumlah kecil ke Timor-Leste, Laos, dan Vietnam.

